

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh kondisi kemiskinan, seperti kekurangan makanan, pendidikan, kesehatan, pengangguran, gizi buruk, dan lain-lainnya.¹ Penyakit sosial juga kerap muncul sebagai salah satu bentuk permasalahan kampung perkotaan. Penyakit sosial ini kemudian memunculkan kelompok masyarakat miskin di perkotaan. Keberadaan masyarakat miskin kota, seperti para tuna karya, tuna wisma, dan tuna susila masih belum bisa diterima oleh masyarakat lainnya. Mereka merupakan masyarakat yang terpinggirkan yang kemudian mendirikan pemukiman tersendiri. Pemukiman-pemukiman yang dibangun cenderung kumuh dan liar karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk mendirikan rumah yang layak. Pemukiman kumuh dan hunian liar (*squatter*) merupakan permasalahan klasik yang sejak lama telah berkembang di kota-kota besar. Adanya kawasan permukiman kumuh merupakan satu bentuk atau gambaran kurangnya pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak bagi seluruh golongan penduduk.²

¹ Yogi Suprayogi Sugandi, *Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan: Pengalaman Kota Bandung*, dalam Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik (JAKPP), Volume 2, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 109.

² Tadjuddin Noer Effendi, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Tiara Wcana Yogya, 1995), hlm. 123.

Selain itu, masalah yang dianggap cukup serius dan menjadi ciri dari permasalahan di kota yakni terkait kesempatan kerja. Ketidakseimbangan antara kesempatan kerja dengan tenaga kerja yang mencari pekerjaan bukan hanya disebabkan oleh tidak adanya lapangan pekerjaan, tetapi juga terjadinya ketidaksesuaian antara keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan dengan keahlian dan keterampilan yang tersedia. Dampaknya adalah meningkatnya jumlah pengangguran yang disebabkan oleh keterbatasan lapangan kerja.

Pada umumnya masyarakat miskin yang menghuni pemukiman kumuh di perkotaan adalah masyarakat marjinal, yaitu masyarakat yang haknya terhadap tanah, rumah, infrastruktur dan pelayanan dasar, kesempatan kerja dan mendapatkan pinjaman, pemberdayaan dan partisipasi, rasa aman dan keadilan sangatlah terbatas dan terpinggirkan. Mereka kurang mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa bantuan dari pemerintah, lembaga-lembaga atau pihak lain non pemerintah.³ Maka dari itu perlu adanya peran pemerintah dan lembaga-lembaga sosial untuk membantu masyarakat miskin kota tersebut.

Kota Mojokerto merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki permasalahan terkait penyediaan tempat tinggal bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya tuna wisma, tuna karya, dan tuna susila. Pemukiman di Kota Mojokerto tersebar di seluruh wilayah kota. Pemukiman tersebut terdiri dari pemukiman yang sudah legal atau biasa disebut kampung dan pemukiman liar yang illegal karena belum memiliki syarat-syarat administratif

³ Evi Yulia Ulfa, *Kampung Improvement Programme (KIP): Perkembangan dan Perubahannya di Kampung Kebalen Surabaya Tahun 1976-1986*. Skripsi pada Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, 2016, hlm. 3.

sebagai kampung. Pemukiman liar umumnya memiliki tingkat kepadatan bangunan dan penduduk yang lebih tinggi dari kampung biasa dan berlokasi di sepanjang aliran sungai, sekitar rel kereta api, dan juga beberapa kawasan kampung lainnya.

Pemukiman liar di Kota Mojokerto berada di kawasan pasar seperti Pasar Tanjung, Pasar Kliwon, dan Pasar Pon yang sudah muncul sejak tahun 1960 an.⁴ Pasar Pon berada di Desa Mentikan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto. Pada waktu itu pemerintah kota sudah berupaya untuk memukimkan para tuna wisma dan tuna karya, tetapi pemukiman tersebut dianggap sebagai pemukiman liar atau illegal karena belum masuk dalam kategori yang layak untuk dijadikan tempat tinggal. Permukiman liar di sekitar Pasar Pon merupakan kawasan yang dinamakan Siponrejo. Siponrejo ini merupakan nama permukiman yang dihuni oleh para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti tuna wisma dan tuna karya. Pada awalnya PMKS berkeliaran di Pasar Pon yang letaknya di belakang balai Desa Mentikan. Mereka kemudian mendirikan gubuk-gubuk di area persawahan di sekitar Desa Mentikan. Kawasan pemukiman liar inilah yang kemudian disebut daerah Siponrejo.⁵ Suwono Blong sebagai Kepala Desa pada tahun 1969 membentuk Lembaga Yayasan Majapahit untuk menampung dan melindungi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di daerah tersebut. Lembaga Yayasan Majapahit juga turut merehabilitasi para

⁴Wawancara dengan Sufi'i (71 tahun) pada tanggal 2 September 2019 di Pasar Tanjung, Kota Mojokerto.

⁵Wawancara dengan Bambang (57 tahun) pada tanggal 29 Maret 2019 di Kantor Kelurahan Mentikan, Kota Mojokerto.

PMKS agar dapat kembali hidup berdampingan dengan masyarakat lain pada umumnya.⁶

Beberapa titik tempat selain di Desa Mentikan, yang banyak dihuni oleh para tuna wisma dan tuna karya adalah di Alun-alun Kota Mojokerto. Mereka tinggal di bawah pohon-pohon beringin yang ada di Alun-alun. Pemandangan pemukiman kumuh sangatlah mengganggu, karena Alun-alun sebagai ikon dari Kota Mojokerto haruslah bersih dari permukiman apalagi dari hunian liar. Oleh karena itu, dengan adanya Siponrejo yang dibawah oleh Lembaga Yayasan Majapahit, para gelandangan dan pengemis yang berada di Alun-alun, dan juga di Pasar Tanjung pun ikut dipindahkan ke Siponrejo.⁷

Melihat semakin bertambahnya gelandangan dan pengemis yang mendirikan gubuk-gubuk di daerah Siponrejo, Suwono Blong ingin para PMKS yang dibinanya memiliki tempat tinggal menetap dan layak huni. Oleh karena itu, ia kemudian mulai meminta bantuan dari berbagai pihak untuk merealisasikan niatnya membangun perkampungan untuk para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.⁸ Melalui kerjasama antara Yayasan Majapahit dengan Pemerintah Kota Mojokerto dibangunlah kampung untuk para PMKS yang kemudian disebut Kampung Cakarayam II dan Balongcangkring II dari tahun

⁶“Blong Merasa Plong Membangun Desa”, dalam Majalah *Zaman* No. 28 Th. IV, 3 April 1983, hlm. 56.

⁷*Wawancara* dengan Sufi'i (71 tahun) pada tanggal 2 September 2019 di Pasar Tanjung, Kota Mojokerto.

⁸*Wawancara* dengan Bambang (57 tahun) pada tanggal 29 Maret 2019 di Kantor Kelurahan Mentikan, Kota Mojokerto.

1970.⁹ Karena pada dasarnya permasalahan terkait PMKS juga merupakan salah satu tugas pemerintah yang harus diselesaikan. Usulan dari Yayasan Majapahit sejalan dengan rencana Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto dalam mengurus masalah tuna wisma dan tuna karya di wilayah Kota Mojokerto.¹⁰ Pemindahan tersebut berjalan dengan lancar. Tanah ganjaran Kepala Desa Kauman dan Mentikan¹¹ digunakan untuk membangun Kampung Cakarayam II dan Balongcangkring II. Meskipun namanya telah diubah tetapi penduduk sekitar masih menyebutnya Siponrejo.

Kampung rehabilitasi Cakarayam II dan Balongcangkring II selalu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kota Mojokerto. Rehabilitasi yang dijalankan di kampung ini berupa rehabilitasi fisik dan rehabilitasi sosial. Pada tahun 1987 pemerintah Kota Mojokerto menurunkan Surat Perintah terkait pemindahan tuna susila yang semula tersebar di beberapa tempat di Kota Mojokerto dipindahkan ke Kampung Cakarayam II dan Balongcangkring II.¹² Para tuna susila tersebut turut dibina oleh Lembaga Sosial Yayasan Majapahit sebagaimana para penghuni Kampung Cakarayam II dan Balongcangkring II lainnya.

⁹“Blong Merasa Plong Membangun Desa”, *loc.cit.*,

¹⁰*Surat Pemberitahuan/Bantuan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto kepada Bupati Mojokerto dan Anggota Muspida Kotamadya Mojokerto, Nomor 1984/IV pada tanggal 9 Juni 1970.* Surat ini ditujukan kepada Bupati Kabupaten Mojokerto untuk memberitahukan serta meminta bantuan karena tanah yang akan digunakan untuk pembangunan Kampung Cakarayam II dan Balongcangkring II, berbatasan dengan Desa Djuritan atau Prajurit Kulon yang saat itu masih menjadi bagian dari Kabupaten Mojokerto.

¹¹*Ibid.*,

¹² *Surat Perintah Walikota Samioedin, tentang Penampungan WTS, Nomor 462.3/146/416.16/'87 pada tanggal 9 Pebruari 1987.*

Bertambahnya para tuna susila di Kampung Cakarayam II dan Balongcangkring II menyebabkan kampung yang semula dikenal sebagai kampung rehabilitasi kemudian lebih dikenal sebagai lokalisasi. Meskipun awal mula didirikannya sebagai tempat penampungan serta rehabilitasi bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pada dasarnya rehabilitasi di kampung tersebut masih terus berlanjut, tetapi dengan adanya pernyataan bahwa kampung tersebut juga dijadikan sebagai lokalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi Yayasan Majapahit khususnya pemerintah Kota Mojokerto. Hal inilah yang kemudian mendasari penulis untuk meneliti lebih lanjut terkait dinamika kehidupan di kampung Cakarayam II dan Balongcangkring II.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan, penelitian ini membahas mengenai kampung Cakarayam II dan Balongcangkring II yang merupakan kampung rehabilitasi masyarakat yang terpinggirkan di Kota Mojokerto. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana proses pembangunan fisik di kampung rehabilitasi Cakarayam II dan Balongcangkring II tahun 1970-1987 ?

Didirikannya kampung Cakarayam II dan Balongcangkring II sebagai kampung rehabilitasi mampu membawa banyak perubahan yang signifikan bagi banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Mojokerto. Dengan demikian, permasalahan kedua yang akan dibahas adalah aktivitas pembinaan

rehabilitasi sosial di kampung Cakarayam II dan Balongcangkring II di Mojokerto tahun 1970-1987 ?

1.3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan keadaan penduduk khususnya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Mojokerto tahun 1970-1987. Keadaan tersebut yang mendorong awal mula didirikannya kampung Cakarayam II dan Balongcangkring II sebagai kampung rehabilitasi. Selain itu, tulisan ini juga menjelaskan pelaksanaan dari rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di kampung Cakarayam II dan Balongcangkring II tahun 1970-1987.

Adapun manfaat dari penelitian tentang perkembangan Kampung Cakarayam II dan Balongcangkring II sebagai tempat rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 1970-1987, secara umum mampu menambah kajian tentang kampung. Melalui tulisan ini nantinya dapat memberi gambaran mengenai kampung rehabilitasi yang bergerak dalam bidang pemberantasan dan pembinaan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pembinaan ini nantinya dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain yang memiliki permasalahan sama halnya dengan Kota Mojokerto yakni terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Secara historiografis penelitian ini merupakan sebuah studi sejarah sosial dengan fokus kajian tentang kampung. Kajian-kajian tentang suatu wilayah di Kota Mojokerto juga jarang ditemukan. Buku referensi yang ditulis hanya berupa

laporan atau sebatas profil kota sehingga hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi historiografi wilayah Kota Mojokerto. Melalui penelitian ini, pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pembangunan dan kelangsungan sebuah kota dapat melihat bahwa terdapat berbagai lapisan masyarakat yang mendukung dalam sebuah kehidupan kota. Berdasarkan fakta ini, pemerintah dapat menganalisis dan memetakan serta memanfaatkan potensi yang ada di wilayahnya untuk selanjutnya diimplementasikan dalam pembangunan era kini.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Batasan spasial dan temporal dalam penulisan sejarah merupakan fokus dalam menentukan objek penelitian yang dikaji. Periodisasi dan pembabakan merupakan pengelompokkan dari peristiwa-peristiwa historis yang menonjol dalam suatu kesatuan kronologis atau waktu tertentu, seperti abad, masa pemerintahan suatu dinasti kerajaan, pengaruh penjajahan, faham-faham baru ataupun peristiwa politik tertentu.¹³ Batasan spasial dan temporal bertujuan agar tidak keluar dari konteks yang dibahas. Alasan pemilihan Kota Mojokerto khususnya Kampung Cakarayam II dan Balongcangkring II sebagai batasan spasial karena letak kampung yang dekat dengan pusat kota dan akses yang mudah didapat serta pada masa itu Kota Mojokerto sedang mengalami perkembangan berkat kebijakan-kebijakan walikota pada periode itu. Akan tetapi,

¹³Aminudin Kasdi, *Memahami Sejarah*, (Surabaya: Unesa Universitas Press, 2005), hlm. 76.

Kota Mojokerto juga memiliki permasalahan yang perlu diperhatikan mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Batasan awal dari penulisan ini adalah tahun 1970 didasari oleh dimulainya pemindahan para pemukim di Siponrejo ke Kampung Cakarayam II dan Balongcangkring II sebagai tempat penampungan gelandangan, pengemis dan tuna susila. Tahun 1987 sebagai batasan akhir karena pada tahun ini diturunkannya surat perintah walikota Mojokerto mengenai pemindahan para wanita tuna susila dari lokalisasi yang tersebar di Kota Mojokerto ke kampung Cakarayam II dan Balongcangkring II. Hal ini dilakukan sebagai salah satu pemusatan lokalisasi di Kota Mojokerto.

1.5. Tinjauan Pustaka

Beberapa buku dan skripsi yang dapat menginspirasi serta menunjang dalam penulisan ini baik yang membahas mengenai permasalahan besar yang ada di kota maupun lingkup kampung di perkotaan. Salah satu skripsi yang membahas tentang *Kota Mojokerto Pada Masa Pemerintahan Walikota Samioedin* ditulis oleh Sari Rahmawati Mahasiswa Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga.¹⁴ Skripsi tersebut membahas tentang kemajuan Kota Mojokerto mulai dari bidang sosial, ekonomi, dan infrastruktur pada masa pemerintahan Walikota Samioedin. Hal yang membedakan penulisan ini dari skripsi tersebut adalah penulisan ini lebih focus pada salah satu kebijakan Walikota Samioedin yakni

¹⁴Sari Rahmawati, *Kota Mojokerto Pada Masa Pemerintahan Walikota Samioedin 1979-1989*. Skripsi pada Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, 2014.

pembangunan kampung Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Selain karena lapangan pekerjaan yang kurang sehingga tidak semua lapisan usia terserap dalam kategori pencari kerja. Hal tersebut masih berlanjut hingga tahun 1980an, sebagian besar pencari kerja didominasi oleh laki-laki. Rentang usia para pencari kerja terbanyak yakni usia 10-24 tahun.

Buku yang lebih spesifik membahas kampung salah satunya adalah buku bunga rampai *Kampung Perkotaan: Kajian Historis-Antropologis atas Kesenjangan Sosial dan Ruang Kota* oleh Johny A. Khusyairi dan La Ode Rabani (ed).¹⁵ Fokus pada buku ini menjelaskan mengenai kampung-kampung perkotaan sebagai sebuah konstruksi historis dan menganalisa penduduk kampung maupun negara telah mendefinisikan kampung perkotaan bukan hanya sebatas konsep melainkan sebagai realitas sosial yang selalu hidup.

Buku lainnya adalah buku *Masuk Kampung Keluar Kampung: Surabaya Kilas Balik* oleh Akhudiati.¹⁶ Buku menginspirasi untuk penelitian terkait kampung perkotaan. Dalam buku dijelaskan secara mendetail mengenai seluk beluk kampung di Surabaya mulai dari fasilitas hingga aktivitas sosial masyarakatnyaseperti budaya *arek*, “penduduk kuburan”, penduduk malam dan lain-lain sebagainya.

¹⁵Johny A. Khusyairi dan La Ode Rabani (ed), *Kampung Perkotaan: Kajian Historis-Antropologis atas Kesenjangan Sosial dan Ruang Kota*, (Yogyakarta: Penerbit New Elmatara, 2011).

¹⁶Akhudiati, *Masuk Kampung Keluar Kampung: Surabaya Kilas Balik*, (Surabaya: Henk Publica, 2008).

Karya Lea Jellinek yang berjudul *Seperti Roda Berputar: Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta*.¹⁷ Buku ini menggambarkan evolusi dan transformasi dari sebuah kampung di Jakarta yang masyarakatnya mengalami perubahan-perubahan secara cepat. Kampung yang dijadikan obyek penelitian adalah Kampung Kebun Kacang yang letaknya di pusat kota. Kampung ini terancam digusur karena dipandang oleh para perencana kota sebagai daerah kumuh yang mengganggu.

Penelitian oleh Evi Yulia Ulfa yang berjudul *Kampung Improvement Programme (KIP): Perkembangan Dan Perubahannya di Kampung Kebalen Surabaya Tahun 1976-1986*.¹⁸ Skripsi ini menjelaskan tentang upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan perkampungan kumuh di Surabaya serta penerapan dan dampak yang dihasilkan dari kebijakan yang telah diputuskan. Upaya tersebut adalah pelaksanaan Kampung Improvement Programme (KIP) di Surabaya khususnya di Kampung Kebalen. Kampung Improvement Programme (KIP) Kampung Kebalen merupakan penataan pemukiman lama, karena sasaran dari KIP adalah kampung yang sudah terbangun. Masalah utama dari pemukiman lama yang perlu ditata adalah adanya pemukiman kumuh.

Selain beberapa buku diatas masih banyak pula buku-buku yang membahas mengenai kampung di perkotaan khususnya terkait gelandangan, pengemis, dan tuna susila yang menempati ruang-ruang perkotaan. Akan tetapi

¹⁷Lea Jellinek, *Seperti Roda Berputar: Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta*, (Jakarta: LP3ES, 1994).

¹⁸Evi Yulia Ulfa, *Kampung Improvement Programme (KIP): Perkembangan dan Perubahannya di Kampung Kebalen Surabaya Tahun 1976-1986*. Skripsi pada Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, 2016.

dilihat dari tinjauan buku tersebut kebanyakan membahas mengenai permasalahan sosial yang disebabkan karena kemiskinan di perkotaan. Penelitian ini lebih membahas mengenai kampung rehabilitasi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditempatkan dalam satu kampung di Kota Mojokerto.

1.6. Kerangka Konseptual

Penelitian ini merupakan penelitian Sejarah Sosial yang bertemakan tentang perkembangan kampung dan aktivitas perkampungan yakni kampung rehabilitasi yang ada di Kota Mojokerto. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan ilmu bantu untuk menganalisis, yakni konsep dan teori yang sesuai. Hal ini dikarenakan landasan teori maupun kerangka konseptual memiliki peran penting dalam suatu penulisan karya ilmiah. Apalagi dalam melukiskan kondisi sosial, ekonomi, dan politik tidak hanya melalui penggambaran secara kronologis saja, akan tetapi diperlukan suatu peristiwa sejarah bersifat kompleks yang dapat diperoleh dengan menggunakan pendekatan dari ilmu sosial.¹⁹

Penggunaan pendekatan ilmu sosial menuntut sejarawan untuk menggunakan teori dan konsep dari disiplin sosial lainnya, baik sosiologis, antropologis, dan ilmu politik yang merupakan pendekatan-pendekatan penting bagi penelitian ini. Jika pendekatan sosiologis dimanfaatkan antara lain dalam memahami kelompok-kelompok sosial yang berperan dan hubungan antar

¹⁹ Sartono Kartodirjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif* (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 14-21.

kelompok. Maka penggunaan pendekatan antropologis digunakan sebagai media dalam mengungkapkan nilai-nilai yang mendasari perilaku tokoh-tokoh tertentu, masalah status dan sistem kepercayaan yang mendasari pola hidup mereka. Penggunaan teori dan konsep tersebut dapat menjelaskan dalam kausalitas suatu fenomena sejarah dan dapat memperkuat analisis masalah.²⁰ Melalui pendekatan sosial, penelitian ini mencoba memahami perubahan-perubahan sosial individu-individu yang tinggal didalam kampung rehabilitasi tersebut. Tersingkapnya banyak segi yang beragam dalam kehidupan mereka yakni dengan memperhatikan penduduk kampung dalam komunitasnya yang menyatu.²¹

Kampung memiliki beberapa pengertian. Pada wilayah-wilayah yang jauh dari kota, kampung sebagai tempat memiliki artian yang serupa dengan desa atau dusun. Secara administratif, kampung merupakan kesatuan administrasi terkecil yang menempati wilayah tertentu yang terletak dibawah kecamatan. Jika dilihat dari aspek hukum, kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan letaknya berada di Kabupaten atau Kota.²²

Kampung-kampung yang berada diwilayah perkotaan disebut juga sebagai kampung kota. Dapat pula diartikan sebagai suatu kelompok rumah yang

²⁰*Ibid.*, hlm. 57

²¹Lea Jellinek, *Seperti Roda Berputar: Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 10.

²²Agus S. Sadana, *Perencanaan Kawasan Pemukiman*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 22.

merupakan bagian dari kota dan sebagian besar penghuninya berpenghasilan rendah.²³ Pendapat Lea Jellinek mengenai kampung-kampung yang ada di pusat perkotaan merupakan suatu daerah yang kumuh yang ditinggalkan, namun lebih sering merupakan wilayah pedesaan yang tercakup oleh perluasan ruang kota. Perkampungan pada mulanya dibangun sebagai ruang yang kemudian melalui proses dari intensifikasi pembangunan menyebabkan semakin menyerap banyaknya orang pindah untuk bermukim di kampung-kampung.²⁴

Menelusuri sejarah asal-usul kampung merupakan bagian penting dari citra yang dimiliki kampung itu sendiri. Johny A. Khusyairi dan La Ode Rabani cenderung memahami kampung sebagai pemukiman bersama yang muncul begitu saja, bukan merupakan bagian dari suatu rencana penataan jalan dan penempatan bangunan. Penempatan lahan biasanya tidak teratur baik dalam bentuk maupun ukurannya, pola-pola antar permukiman cenderung *zig-zag*, dan rumah-rumah dibangun sendiri oleh penduduk.²⁵ Definisi ini digunakan untuk menganalisa mengenai perkampungan liar sebelum dibangunnya Kampung Balongcangkring II dan Cakarayam II. Pemukiman ini muncul begitu saja dan belum bisa dikatakan sebagai kampung karena belum memenuhi syarat kampung secara administratif. Perkampungan memiliki arti sebagai tempat berkumpul dan biasanya dihuni oleh masyarakat yang memiliki keterkaitan latar belakang sosial, budaya dan ekonomi,

²³*Ibid.*, hlm. 23.

²⁴Johny A. Khusyairi-La Ode Rabani, *Kampung Perkotaan Indonesia: Kajian Historis-Antropologis terhadap Kesenjangan Sosial dan Ruang Kota*, (Yogyakarta: New Elmatara, 2011), hlm. xiii

²⁵*Ibid.*, hlm. xiv

seperti perkampungan nelayan, kampung arab, kampung pecinan, dan kampung Madura.²⁶

Berbekal kerangka teori, penulis menganalisa bagaimana kampung rehabilitasi dalam penelitian ini dijelaskan menggunakan konsep kampung sedangkan rehabilitasi merupakan citra dari asal usul kampung tersebut didirikan serta usaha pemerintah dalam memukimkan masyarakat yang terpinggirkan. Adanya rehabilitasi di kampung ini karena dilatar belakangi oleh penduduknya yang mempunyai permasalahan sosial sehingga perlu adanya rehabilitasi sosial. Rehabilitasi merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar para penyandang penyakit sosial dapat kembali melaksanakan kehidupan bermasyarakat pada umumnya.²⁷ Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan oleh lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat atau dari masyarakat yang bekerjasama dengan pemerintah.

Sedangkan kampung rehabilitasi merupakan kampung yang berisi orang-orang dengan masalah keterbelakangan sosial. Fungsi dari kampung rehabilitasi tidaklah sebatas tempat penampungan dan perlindungan melainkan juga sebagai tempat berprosesnya pemulihan, pengembalian, dan pembinaan pada keadaan yang lebih baik. Adanya kampung tersebut diharapkan mampu mengurangi banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial di daerah tersebut. Mereka

²⁶Agus S. Sadana, *op.cit.*, hlm. 24.

²⁷J.P. Caplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, terj. Kartini Kartono, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 425.

yang tinggal di kampung rehabilitasi dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Mereka akan dibina supaya menjadi lebih baik dan dapat kembali hidup berdampingan dengan masyarakat lain pada umumnya.

Penelitian ini membagi bentuk rehabilitasi berupa rehabilitasi fisik dan rehabilitasi sosial. Para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya yang berada di kampung Cakarayam II dan Balongcangkring II sebagian besar merupakan tuna wisma dan tuna karya. Melalui rehabilitasi fisik mereka diberikan lahan untuk mendirikan tempat tinggal. Mereka juga diberi bantuan untuk mendirikan rumah-rumah dan diberi pekerjaan yang layak. Melalui rehabilitasi sosial mereka diberi bekal keterampilan serta pemahaman-pemahaman agama. Harapan dari adanya rehabilitasi tersebut mereka dapat kembali hidup bermasyarakat pada umumnya.

1.7. Metode Penelitian

Penelitian yang berjudul “*Memukimkan Masyarakat yang Terpinggirkan di Kota Mojokerto tahun 1970-1987: Kampung Rehabilitasi Cakarayam II dan Balongcangkring II*” ini dalam proses penyusunannya membutuhkan tahapan-tahapan metode dalam penelitian sejarah, pendekatan-pendekatan, serta penerapan ilmu bantu lainnya. Metode penelitian sejarah mempunyai beberapa tahapan yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), interpretasi, dan penulisan (historiografi).²⁸

²⁸Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 69.

Awal mula penulis memilih tema ini terinspirasi dari Skripsi Kota Mojokerto Pada Masa Pemerintah Walikota Samioedin yang menjelaskan mengenai perkembangan Kota Mojokerto dibawah kepemimpinan Walikota Samioedin. Beberapa kebijakan-kebijakan diantaranya adalah mengenai kerjasama dengan salah satu Yayasan yang membina Kampung Cakarayam II dan Balongcangkring II dalam pembangunan serta rehabilitasi. Penulis kemudian tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait kampung tersebut. Karena kampung yang semula diperuntukkan sebagai tempat rehabilitasi lambat laun lebih dikenal sebagai lokalisasi.

Sehubungan dengan tema dalam penelitian ini yang berkuat di Kota Mojokerto maka dalam tahap pengumpulan sumber (heuristic), penulis lebih banyak mengumpulkan sumber dari wilayah yang bersangkutan yakni Kota Mojokerto. Kategori jenis sumber tersebut berupa sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari arsip dan surat kabar. Arsip tersebut diperoleh dari Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto yang berupa surat perintah pemindahan para WTS dalam satu lokasi, serta surat kabar yang penulis dapatkan dari Jawa Post, Radar Kota, dan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Surabaya Almamater Wartawan Surabaya (STIKOSA-AWS).

Sumber sekunder yang digunakan untuk mendukung sumber primer dalam penulisan berupa literature yang diperoleh dari perpustakaan Medayu Agung, Perpustakaan dan Arsip Kota Mojokerto, Perpustakaan Pusat Unair, Ruang Baca Fakultas Ilmu Budaya, dan Ruang Baca Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu

Budaya Unair. Beberapa buku juga dijadikan sebagai rujukan seperti “Dasa Warsa Pengabdianku, Walikotamadya KDH. Tingkat II Mojokerto (Periode: 1979-1984 – 1984-1989)” yang merupakan laporan pencapaian dari Walikota Samioedin selama masa kepemimpinannya di Kota Mojokerto. Sebagai rujukan utama buku ini juga masih belum memuaskan sehingga perlu adanya buku referensi lain guna menambah pemahaman. Selain sumber primer dan sumber sekunder, penulis juga menggunakan sumber lisan untuk melengkapi kekurangan dari sumber tertulis. Sumber lisan berupa wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan kampung Cakarayam II dan Balongcangkring II seperti warga sekitar, para pegawai di Kantor Kepala Desa Mentikan, Pulorejo, serta Yayasan Majapahit.

Setelah semua sumber terkumpul, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan kritik sumber dan mengverifikasi sumber baik itu sumber lisan maupun tulisan. Kritik sumber tersebut dilakukan penulis melalui proses kritik intern maupun kritik ekstern. Kritik intern bertujuan untuk meneliti tingkat kebenaran isi data yang digunakan agar dapat dipercaya kebenarannya sedangkan kritik ekstern dilakukan guna memperoleh keaslian sumber. Pada tahapan ini, sumber-sumber yang telah didapat, diuji, dan ditelaah lebih jauh sehingga sumber dapat dipastikan keasliannya.

Interpretasi merupakan tahap selanjutnya setelah kritik sumber selesai dilakukan. Pada tahapan ini fakta-fakta yang ditemukan kemudian ditafsirkan dan dianalisis dan dihubungkan sehingga membentuk suatu runtutan yang kronologis. Tahapan terakhir yang dilakukan ialah historiografi yakni penulisan data-data

yang telah ditemukan berdasarkan pada sistematika penulisan yang telah dirancang.

1.8. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian tersebut kemudian disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang kehidupan sosial di Kota Mojokerto tahun 1970-1987. Pembahasannya akan dibagi menjadi tiga sub. Sub bab pertama akan membahas tentang kondisi umum Kota Mojokerto. Sub bab kedua akan membahas mengenai kondisi demografi Kota Mojokerto. Sub bab ketiga akan membahas mengenai Yayasan Majapahit yang merupakan salah satu lembaga yang menaungi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Mojokerto. Penjelasan mengenai Yayasan Mojopahit nantinya akan mengarah pada didirikannya kampung rehabilitasi Cakarayam II dan Balongcangkring II.

Bab III membahas mengenai rehabilitasi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di Kampung Cakarayam I dan Balongcangkring II 1970-1987. Sub bab pertama akan dijelaskan mengenai proses pembangunan Kampung Cakarayam II dan Balongcangkring II yang merupakan salah satu kampung binaan beberapa tuna di Kota Mojokerto. Pada bab ini akan dijelaskan tentang bagaimana kerjasama yang dijalin antara pemerintah Kota Mojokerto

dengan pengurus Yayasan Majapahit yang menaungi Kampung Cakarayam II dan Balongcangkring II.

Sub bab kedua menjelaskan tentang kehidupan para pemukim yang terdiri dari tuna wisma, tuna karya, dan tuna susila di Kampung Cakarayam II dan Balongcangkring II. Sub bab ketiga membahas tentang bentuk rehabilitasi terhadap masyarakat kampung Kampung Cakarayam II dan Balongcangkring II tahun 1987-1987 serta hasil dari adanya rehabilitasi tersebut.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.